



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BKKBN, BADAN POM, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : II
Jenis : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Kepala BKKBN
Sifat : **Terbuka**
Hari, tanggal : Kamis, 28 Januari 2010
Waktu : Pukul 16.00 WIB - selesai
Ketua Rapat : dr. Ahmad Nizar Shihab, Ds.An /Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I
Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara : 1. Paparan BKKBN tentang Tupoksi.
2. Realisasi Anggaran Tahun 2009.
3. Program Kerja
4. Lain-lain.
Jumlah kehadiran : Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI,
orang Ijin,

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BKKBN dibuka pukul 16.10 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tertib Pasal 245 ayat (1), rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Visi BKKBN adalah penduduk tumbuh seimbang. Misi BKKBN adalah mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga kecil bahagia sejahtera.
2. Strategi BKKBN dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan KB antara lain :
 - a. Menyeraskan kebijakan kependudukan dan pembangunan KB.
 - b. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola kependudukan dan KB.
 - c. Memperkuat SDM aparatur Negara dan tenaga program.
 - d. Menggerakkan dan memberdayakan stakeholder, mitra kerja dan masyarakat.
 - e. Meningkatkan pembiayaan.
 - f. Menyediakan data dan informasi kependudukan dan KB.

3. Anggaran tahun 2009 sebesar Rp.1.196,8 Milyar, mengalami penurunan dari anggaran tahun 2008 sebesar Rp. 1,200,6 Milyar. Sampai dengan Desember 2009 telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 1.149,8 Milyar (96,08%). Untuk tahun 2010 pagu anggaran BKKBN sebesar Rp. 1,234 Trilyun atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan pagu 2009 yang mencapai Rp. 1,198,8 Trilyun.
4. Program KB Nasional memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 sebesar Rp. 329,01 Milyar yang diperuntukan bagi 373 Kab/Kota.
5. Dengan disahkannya UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kedudukan BKKBN menjadi lebih kuat karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih jelas dan tegas. Perubahan kepanjangan singkatan BKKBN dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berkedudukan di pusat dan di daerah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)
6. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai RPJMN melalui revitalisasi dan reformulasi program KB Nasional meliputi :
 - a. Membangun kembali komitmen dengan stakeholder dan mitra kerja;
 - b. Mereformulasi arah kebijakan program yang tertuang dalam visi strategi Program KB Nasional yang baru;
 - c. Rebranding atau perubahan logo institusi BKKBN dan logo program;
 - d. Membangun kesepakatan antara Kepala BKKBN provinsi dan Kepala BKKBN Pusat dengan menandatangani kontrak kinerja yang terdiri dari 9 (Sembilan) indikator sebagai sasaran kinerja BKKBN Provinsi.
7. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Nasional sebesar 1,14% pertahun dan diperkirakan 231 juta jiwa pada tahun 2009 sebesar 231 juta jiwa sesuai Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005), sehingga menempatkan Indonesia pada urutan ke 4 sebagai Negara penduduk terbanyak di dunia, setelah China, India dan Amerika Serikat. Pelaksanaan sensus penduduk direncanakan pada tahun 2010.
8. Rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2010 antara lain peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui Revitalisasi Program KB, dengan capaian sasaran :
 - a. Terlayannya peserta KB baru sekitar 7,1 juta peserta, yang 3,7 diantaranya adalah peserta KB baru miskin dan sekitar 254,5 ribu adalah peserta KB baru pria.
 - b. Meningkatnya peserta KB Aktif menjadi sekitar 26,7 juta peserta, yang 11,9 juta diantaranya adalah peserta KB aktif miskin dan sekitar 659,5 ribu adalah peserta KB aktif pria.
 - c. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan keluarga akseptor tentang: pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok BKB; pembinaan kualitas kehidupan keluarga lansia melalui kelompok BKL; dan usaha peningkatan pendapatan ekonomi keluarga melalui pembinaan kelompok kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga.
 - d. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, keluarga, dan remaja tentang kesehatan reproduksi bagi remaja dan perencanaan kehidupan berkeluarga melalui kelompok BKR dan PIK-KRR.
9. Perlu evaluasi program Kesehatan Reproduksi Remaja, khususnya yang berkaitan dengan pendirian Pusat Konsultasi Remaja. Diharapkan program tersebut dapat lebih meningkatkan pemahaman remaja dalam berkeluarga kelak dan dapat menurunkan angka seks pranikah dan perilaku seks bebas. Posisi wanita dalam program *unmet need*, agar diperlakukan lebih adil, sehingga wanita diharapkan mempunyai posisi tawar yang kuat dalam memutuskan masalah KB bersama pasangannya.
10. Dalam rangka memberikan panduan tentang Keluarga Berencana pada sisi keagamaan, termasuk nasehat perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi dan pengaturan kelahiran, BKKBN perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Departemen Agama.

11. PPKBD dan Sub PPKBD sebagai institusi masyarakat pedesaan yang berperan sebagai motivator untuk mengajak masyarakat sekitarnya ber KB, diharapkan dapat bekerja sama dan bersinergi dengan program Desa Siaga Kementerian Kesehatan.
12. Untuk menambah motivasi agar para Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tidak beralih kepada bidang lain, disarankan agar BKKBN terus mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada para petugas lapangan KB disertai pemberian insentif kepada mereka
13. Rencana pelaksanaan Survey Kependudukan Tahun 2010 oleh BKKBN diharapkan menghasilkan data kependudukan yang akurat dan disarankan untuk meningkatkan kerjasama dengan BPS. Untuk melakukan diversifikasi pendataan kependudukan diusulkan tidak hanya melalui pelaksanaan sensus dan survey namun bisa dengan Registrasi Vital Penduduk dan data-data kependudukan yang dimiliki oleh instansi lain.
14. BKKBN diharapkan terus meningkatkan program pengembangan budaya kerja "Cerdas, Ulet dan Kemitraan" serta meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menjadi *leading sector* dalam pembangunan dan pengembangan kependudukan.
15. Komisi IX DPR RI mendukung langkah-langkah BKKBN dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain, sesuai dengan rekomendasi RDP sebelumnya. Pertemuan dengan berbagai instansi diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan program yang membantu pengembangan program KB secara nasional. Komisi IX DPR RI mendukung sepenuhnya penandatanganan kerjasama antara BKKBN dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKASI) dan berharap MoU tersebut bisa mempercepat pelaksanaan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
16. Penyediaan alat kontrasepsi kepada masyarakat perlu lebih diawasi oleh BKKBN, karena ditemukan fakta alat kontrasepsi yang seharusnya tidak bayar /gratis tetapi harus dibeli. BKKBN diharapkan melakukan sosialisasi sehubungan adanya pil KB yang dapat mengurangi dampak penyakit Osteoporosis.
17. BKKBN didesak untuk segera melakukan reorganisasi dan lebih memfokuskan program pembangunan berwawasan kependudukan dan peyelenggara keluarga berencana sesuai dengan amanat UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
18. Menyadari minimnya anggaran untuk BKKBN, disisi lain BKKBN melaksanakan tugas yang bersifat strategis, oleh karena itu Komisi IX DPR RI mendukung dan akan memperjuangkan adanya peningkatan anggaran BKKBN melalui APBN-P.

III. KESIMPULAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BKKBN pada hari ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk segera melakukan reorganisasi dan lebih memfokuskan program pembangunan berwawasan kependudukan dan menyelenggarakan keluarga berencana sesuai dengan amanat UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
2. Komisi IX DPR RI mendukung sepenuhnya penandatanganan MoU antara BKKBN dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKASI) dan berharap MoU tersebut bisa mempercepat pelaksanaan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

3. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk terus berkoordinasi dengan BPS dalam penyelenggaraan Sensus Penduduk 2010, sehingga hasil sensus tersebut dapat menghasilkan data yang maksimal.
4. Komisi IX DPR RI mendorong BKKBN untuk melakukan diversifikasi pendataan kependudukan tidak hanya melalui sensus dan survey namun bisa dengan registrasi vital penduduk dan data-data kependudukan yang dimiliki oleh instansi lain.
5. Komisi IX DPR RI menyadari minimnya anggaran untuk BKKBN oleh karena itu Komisi IX DPR RI mendukung adanya peningkatan anggaran BKKBN melalui APBN-P.
6. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk melakukan kajian tentang efektivitas Program Kesehatan Reproduksi Remaja terhadap perilaku seks bebas di kalangan remaja dan program pembangunan keluarga dengan strategi pengarusutamaan gender.

Rapat diakhiri pukul 18.30 WIB.

 PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Ds.An